

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG TIM
PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar nama Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menyempurnakan daftar nama Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttt

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
95 TAHUN 2020 TENTANG TIM
PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 141 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi	Honorarium
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	750.000
Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	650.000
Anggota			
	1. Sarah Arlina	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	500.000
	2. Angga Sanjaya Lingga	Biro Umum dan Keuangan	500.000
	3. Festiana Niyanti	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian	500.000
	4. Angga Widita Amirul	Inspektorat	500.000
	5. Rizky Arimawati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	6. Octo Army	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	500.000

7.	Satriyo Wibowo	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	500.000
8.	Widya Prima Sari Fultanegara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	500.000
9.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	500.000
10.	Devi Yanurida	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	500.000
11.	Mohamad Irvan Faradian	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000
12.	Anita Carollin	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	500.000
13.	Yohana Surat Payon Philips	Direktorat Sertifikasi Profesi	500.000
14.	Sugianto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	500.000
15.	Muhamad Dwi Sumanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	500.000
16.	Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO